

SIARAN PERS SEMILOKA MASYARAKAT SIPIL UNTUK ASEAN 2023

“Pentingnya Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mendorong ASEAN yang Inklusif”

Jakarta, 14 – 15 Maret 2023

Pada tanggal 14 dan 15 Maret 2023, **International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)**, **Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK)**, **Kalyanamitra**, **Oxfam di Indonesia**, **Asosiasi LBH APIK Indonesia**, **Perkumpulan Prakarsa**, **Dompot Dhuafa (DD)**, **Transparency International Indonesia (TI-I)**, **Human Initiative (HI)**, dan **Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)** berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan ASEAN Semiloka 2023 bertajuk “Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Ketetuaan ASEAN 2023”. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Sutasoma, Jakarta Selatan.

Kegiatan Semiloka ASEAN diselenggarakan untuk berbagi pandangan dari para pihak mengenai pentingnya peranan masyarakat sipil dalam mensukseskan agenda ASEAN 2023. Terdapat enam agenda yang dibahas yaitu, 1) Transisi energi yang berkeadilan dan adil gender, 2) Kerja perawatan yang berkeadilan gender, 3) Penghapusan kekerasan berbasis gender, 4) Bisnis yang Inklusif dan Bertanggung Jawab, 5) Kepemimpinan lokal untuk aksi kemanusiaan, dan 6) Perpajakan yang adil. Diharapkan keenam isu yang didiskusikan dalam Semiloka ini menjadi agenda prioritas di ASEAN.

Kegiatan diinisiasi bertepatan dengan Ketetuaan Indonesia di ASEAN 2023. Ketetuaan Indonesia di ASEAN 2023 mengambil tema ‘*ASEAN Matters: The Epicentrum of Growth*’. Masyarakat sipil berharap ASEAN semakin relevan bagi masyarakat, serta semakin relevan bagi Kawasan khususnya Indo Pasifik dan dunia.

Sebagai aktor pembangunan, peran masyarakat sipil penting untuk memastikan pertumbuhan ASEAN bisa dinikmati oleh semua khususnya masyarakat ASEAN. Menurut Listyowati, Ketua Kalyanamitra “Organisasi Masyarakat Sipil harus tetap mengambil ruang-ruang yang ada, untuk menyuarakan dan memastikan isu-isu hak asasi manusia dan demokrasi menjadi *concern* ASEAN, melalui agenda masyarakat sipil”.

Lebih lanjut, Khotimun Sutanti Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK menegaskan “Untuk mewujudkan komitmen Open Government, Pemerintah perlu lebih akomodatif menyediakan mekanisme resmi bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasinya pada konteks kebijakan ASEAN, terutama pada isu kelompok yang rentan terdampak kebijakan pembangunan”. Mekanisme ini penting untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dalam agenda-agenda pembahasan di ASEAN. Selain itu, pelibatan organisasi masyarakat sipil juga



penting untuk memastikan suara masyarakat - khususnya perempuan dan kelompok rentan - didengar oleh pengambil kebijakan di ASEAN”.

Semiloka selain menghadirkan masyarakat sipil yang bekerja di berbagai bidang seperti kesetaraan gender, Keuangan yang berkelanjutan, dan keberlanjutan lingkungan dari berbagai negara, juga menghadirkan para pembicara dari para pihak seperti pemerintah, sektor swasta, media, dan Lembaga kajian.

Narahubung

Rena Herdiyani – Kalyanamitra (08129820147)

Khotimun Sutanti – Asosiasi LBH APIK Indonesia (081212210141)

Syamsul Ardiansyah – Dompot Dhuafa (081315912363)